



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0078919.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI FITNAH INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ISMA JANUARTI, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 1 Tanggal 19 November 2016 yang dibuat oleh ISMA JANUARTI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MASYARAKAT ANTI FITNAH INDONESIA disingkat MAFINDO tanggal 21 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016112136101815 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MASYARAKAT ANTI FITNAH INDONESIA disingkat MAFINDO;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI FITNAH INDONESIA disingkat MAFINDO
Berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN, sesuai salinan Akta Nomor 1 Tanggal 19 November 2016 yang dibuat oleh ISMA JANUARTI, SH., M.KN , yang berkedudukan di KABUPATEN SUKABUMI.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 November 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 21 November 2016





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0078919.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI FITNAH INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SEPTIAJI EKO NUGROHO	3307070609780005	PENGURUS	KETUA
FAISAL ADITYA PUTRA	3171032708830006	PENGURUS	SEKRETARIS
ARIBOWO SASMITO	3674031207770020	PENGURUS	BENDAHARA
HARRY SUFEHMI	3174050710740007	PENGAWAS	KETUA
EKO JUNIARTO	3175091606720006	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 November
2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 21 November 2016

